



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULAIMAN**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **759836**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.170.000.000**

1. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 15.45 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah Seluas 4488 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 933 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 6375 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 4800 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 7128 m2/308 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 17.000.000**

1. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T/ SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA WW125EXS(B)-1N A/T / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 60.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	220.776.849
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.467.776.849
III. HUTANG	Rp.	286.977.470
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.180.799.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.